

# Effectiveness of Welfare Improvement Through SIKS-NG

## Efektivitas Peningkatan Kesejahteraan Melalui SIKS-NG

Fanisya Lailiya Rachma<sup>1)</sup>, Isnaini Rodiyah<sup>\*2)</sup>

<sup>1, 2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [isnainirodiyah@umsida.ac.id](mailto:isnainirodiyah@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study examines the effectiveness of the SIKS-NG application in improving social welfare in Kludan Village. Informants were selected through purposive sampling, focusing on individuals with deep knowledge of SIKS-NG implementation, including village operators. Primary data were gathered through observation, in-depth interviews, and documentation, while secondary data were obtained from literature studies. Data were analyzed through reduction, descriptive presentation, and conclusion drawing, with attention to validity and reliability. The findings indicate that SIKS-NG supports accurate and transparent social assistance data collection and distribution, although data validity issues remain because of limited features and the need for manual verification. In terms of integration, the application connects the village government and the Social Service, but lacks direct communication and public outreach features. Regarding adaptation, the system responds well to regulatory changes and is supported by operator training, yet still requires feedback mechanisms and stronger technical support.*

**Keywords** – Effectiveness; SIKS-NG; Community Welfare; Social Assistance; E-Government

**Abstrak.** *Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas aplikasi SIKS-NG dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Kludan. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan memilih informan yang memiliki wawasan mendalam terkait implementasi SIKS-NG, di antaranya yang operator aplikasi SIKS-NG desa. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk data primer, serta studi literatur untuk data sekunder. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan Kesimpulan dengan memperhatikan validitas dan reliabilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIKS-NG pada indikator pencapaian tujuan memfasilitasi pendataan dan penyaluran bantuan sosial secara akurat dan transparan, meski masih terdapat kendala validitas data akibat keterbatasan fitur dan perlunya verifikasi manual. Pada indikator integrasi, SIKS-NG mampu menghubungkan berbagai pihak terkait seperti pemerintahan desa dan Dinas Sosial, namun masih kekurangan fitur komunikasi langsung dan sosialisasi ke masyarakat. Pada indikator adaptasi, system responsif terhadap perubahan regulasi serta didukung pelatihan operator, namun masih perlu pengembangan fitur umpan balik dan dukungan teknis.*

**Kata Kunci** – Efektivitas; SIKS-NG; Kesejahteraan Masyarakat; Bantuan Sosial; E-Government

## I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan internet telah berdampak terhadap kehidupan manusia. Teknologi informasi telah berkembang pesat di era globalisasi. Penerapan system pemerintahan yang berbasis teknologi digital (SPBE) tidak bisa terlepas dari keberadaan pemerintahan digital (e-government). Ini mencakup penyediaan sistem informasi yang mendukung pengelolaan dan penyimpanan data serta mempermudah akses terhadap informasi yang tepat[1]. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government, pemerintah mampu memperbaiki efisiensi dan efektivitas dalam memberikan layanan publik serta memperkuat kolaborasi antara instansi pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat[2]. E-Government menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah, serta mengubah cara berinteraksi dengan warga melalui WAN, internet, dan seluler[3]. Pelaksanaan kebijakan pemerintah memerlukan sistem komunikasi untuk memastikan komunikasi yang efektif dan bermakna yang dapat memandu pencapaian tujuan pembangunan[4].

Setiap desa memiliki kontribusi dalam pengelolaan data yang terintegrasi secara nasional untuk mengatasi masalah kemiskinan. Pengelolaan data kemiskinan yang akurat sangat krusial untuk mendukung program pengurangan kemiskinan. Informasi yang akurat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dan efisien, serta mendistribusikan sumber daya secara cermat untuk mencapai sasaran pengurangan kemiskinan dengan sebaik-baiknya. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu dalam Penanganan Warga Miskin dan Tidak Mampu, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa proses verifikasi data bertujuan untuk memeriksakan menilai keakuratan informasi yang dikumpulkan[5]. Data kemiskinan yang berkualitas dapat dimanfaatkan untuk menilai kebijakan pemerintah terkait masalah ini, menganalisis perbandingan kemiskinan dari waktu ke waktu dan antar wilayah, serta menetapkan sasaran bagi

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dengan harapan memperbaiki keadaan hidup mereka[1]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2017 tentang Pendataan Terpadu Penanganan Fakir Miskin tahun 2017, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diwajibkan melakukan peninjauan dan validasi data satu kali dalam setahun [6].

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya yaitu dikeluarkannya aplikasi SIKS-NG, yang dikembangkan oleh Pusdatin Kesos untuk mengelola DTKS sebagai dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial secara tepat sasaran. Dalam operasionalnya, SIKS-NG terintegrasi dengan beberapa lembaga yaitu Dukcapil, sistem data sosial ekonomi sosial untuk penetapan sasaran penerima bantuan, sistem monitoring penyaluran bansos di lingkungan Kemensos. Aplikasi SIKS-NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation mengatur manajemen untuk proses perbaikan dan pengusulan data baru yang mana didalamnya juga terdapat untuk perbaikan dan pengusulan data Bantuan Sosial Pangan (BSP) non PKH [7]. Fitur-fitur yang disediakan di aplikasi SIKS-NG diantaranya menampilkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam suatu desa, termasuk program bantuan yang telah diterima, serta menu pengajuan bantuan sosial yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan Pembiayaan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), dan lain-lain[8].

Dalam penerapannya SIKS-NG memiliki alur: operator di desa atau kelurahan melakukan input DTKS ke aplikasi SIKS-NG, kemudian data yang masuk diverifikasi dan divalidasi oleh petugas Dinas Sosial sebelum diteruskan ke pusat, proses pembaruan dan perubahan data dilakukan melalui fitur update, perbaikan serta usulan baru di aplikasi, data yang sudah terverifikasi kemudian dipakai untuk penentuan penerima manfaat dan penyaluran berbagai jenis bantuan sosial seperti PKH dan BPNT[7]. Proses pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui sejumlah tahapan administrasi. Proses tersebut diawali dengan pengusulan yang disampaikan oleh desa atau kelurahan melalui musyawarah masyarakat. Selanjutnya, data hasil pengusulan tersebut akan melalui proses verifikasi dan validasi di tingkat daerah selama 1-2 bulan.

Aplikasi ini menyediakan formulir untuk data BDT dan PKS setiap desa, yang kemudian diverifikasi dan divalidasi. Tujuan verifikasi dan validasi BDT adalah untuk mengidentifikasi rumah tangga yang memenuhi syarat, sementara verifikasi PKS bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam program bantuan sosial pangan (KKS/RASTRA/BPNT)[9]. Secara khusus, yang diverifikasi untuk KKS adalah KKS nonPKH. Hasil dari proses verifikasi akan disampaikan ke Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia memanfaatkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation agar bantuan sosial dapat mengenai sasaran dengan tepat. SIKS-NG berperan dalam pengaturan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dikelola oleh kepala urusan pelayanan desa. Penerapan SIKS-NG sangat membantu para operator dalam mendata masyarakat untuk data kesejahteraan sosial. Informasi tentang kemiskinan yang tepat sangat diperlukan untuk merancang program yang berhasil dalam mengatasi kemiskinan, berfungsi sebagai landasan untuk memverifikasi dan memvalidasi data demi menurunkan tingkat kemiskinan[10]. Dalam menjalankan proses verifikasi dan validasi data ini, keterlibatan aktif dari pemerintah desa dan kelurahan sangat penting, karena hal ini merupakan faktor utama dalam memastikan penyaluran bantuan sosial dalam program-program penanganan orang miskin dapat mencapai sasaran yang tepat[11].

Salah satu desa yang menerapkan SIKS-NG untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu Desa Kludan. Aplikasi SIKS-NG di Desa Kludan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Kludan dengan menghadirkan solusi digital yang efektif dan efisien. Melalui fitur-fitur unggulannya, aplikasi ini mempermudah pendataan dan memantau warga yang membutuhkan bantuan sosial, sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan transparan[12]. Hal ini memungkinkannya bantuan sosial sampai kepada penerima yang benar-benar membutuhkan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial. Berikut jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial pada periode tahun 2023-2024.

Table 1 Jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Penerima Bantuan Sosial tahun 2023-2024

No	Jenis Bantuan	2023	2024
1.	BPNT	170	190
2.	PKH	100	133
3.	PBI	110	124
4.	BLT	115	129

Sumber: Pemerintah Desa Kludan, 2025

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan data terkait dua jenis bantuan sosial pada bulan Juni-Juli 2024, yaitu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pada periode tersebut, BPNT mengalami penambahan satu usulan baru tanpa adanya penghentian usulan. Sementara itu, PKH juga mencatat satu usulan baru, namun terdapat penghentian usulan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tambahan penerima baru, khususnya pada PKH, jumlah penerima yang dihentikan lebih layak dibandingkan usulan baru yang masuk. Data ini

menggambarkan adanya dinamika penerimaan dan penghentian bantuan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari administrasi, verifikasi data, serta kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat.

Permasalahan yang dihadapi oleh penerapan SIKS-NG di Desa Kludan yang pertama yaitu masih adanya masyarakat miskin yang tidak terdata dalam sistem DTKS sehingga mereka tidak tercakup sebagai penerima bantuan sosial dan pada akhirnya tidak memperoleh hak atas bantuan yang seharusnya bisa mereka akses. Kondisi ini menunjukkan kelemahan dalam mekanisme pendataan dan verifikasi warga miskin di tingkat desa. Permasalahan yang kedua muncul pada tahap pemutakhiran data, di mana ketika terjadi perubahan data penerima bantuan sosial, status yang tercatat di SIKS-NG justru menjadi “bukan penerima bantuan sosial”. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam proses pembaruan data, yang berpotensi menyebabkan penerima yang masih layak kehilangan status dan haknya atas bantuan sosial. Kondisi ini menjadi hambatan dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan, karena berpotensi mengurangi efektivitas serta ketepatan sasaran program yang dijalankan pemerintah.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori efektivitas Richard M. Steers (1985) sebagai landasan teoritis dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan program atau kebijakan yang diteliti. Steers memandang efektivitas organisasi sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membangun integrasi antarunsur yang terlibat, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, efektivitas dalam penelitian ini diukur melalui tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, yang menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam merealisasikan sasaran program; integrasi, yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam membangun koordinasi, komunikasi, dan kerja sama internal maupun eksternal; serta adaptasi, yang menggambarkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika kebijakan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu mengalami masalah serupa dengan Desa Kludan, yaitu penelitian pertama dilakukan oleh Ratnasari, Ismi. Ramadan, Ergi. Nurlatifah, Intan. Ginanjar, Sunandie Eko. Dan Santa Rahmat tahun 2024 yang berjudul “Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Untuk Pengajuan DTKS” diperoleh hasil bahwa aplikasi SIKS-NG digunakan dengan baik oleh operator untuk melakukan pengecekan dan pendataan masyarakat. namun sarana dan prasarana masih kurang diperhatikan. Bantuan disalurkan sesuai penerima data yang membutuhkan, meskipun efektivitasnya terganggu karena tidak ada pengecekan langsung di lapangan. Sosialisasi oleh pemerintah desa yang melibatkan Kepala Dusun, RW, dan RT, namun pengetahuan masyarakat tentang fungsi SIKS-NG masih kurang efektif dan perlu ditingkatkan [13]. Kemudian penelitian kedua dari Pratama, Denny Maulana tahun 2024 dengan judul “Analisis Kebijakan Program Perlindungan Sosial Berdasarkan Pendekatan Berbasis Nilai di Kabupaten Brebes” memiliki hasil bahwa belum optimalnya masyarakat yang mendapatkan program perlindungan sosial. Hal itu disebabkan masih adanya ketimpangan pemahaman dalam proses pengusulan data calon penerima manfaat di tingkat desa [14]. Penelitian ketiga oleh Ni Made Satya Harthamia, Ni Putu Anik Prabawati, I Dewa Ayu Putri Wirantari tahun 2025 berjudul “Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) Studi Kasus Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara” dengan hasil bahwa kurangnya pengetahuan teknologi staf serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang menyebabkan proses pengajuan dan verifikasi data DTKS belum sepenuhnya efektif dan optimal [15].

Penelitian keempat dilakukan oleh Mayumi Getzemani, Ratna Indriasari, dan Definitif Endrina Kartini Mendrofa tahun 2024 dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat” dengan hasil bahwa pelaksanaan program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum efektif dan banyak yang belum tepat sasaran sehingga belum tercapai secara optimal [16]. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Retno Agustin Ningrum dan Isnaini Rodiyah tahun 2019 dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” hasil penelitian ini yaitu bahwa adanya kendala seperti tidak adanya pengecekan di lapangan dan penandaan bahwa rumah tersebut suda penerima PKH [17]. Penelitian terdahulu umumnya membahas mengenai implementasi dan analisis kebijakan SIKS-NG. Sementara itu, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan dengan memberikan evaluasi mengenai efektivitas SIKS-NG. Kesenjangan muncul karena pelaksanaan SIKS-NG yang belum tepat sasaran yang dibuktikan dengan adanya masyarakat miskin tidak terdaftar dalam DTKS, hal ini disebabkan karena petugas yang tidak turun ke lapangan. Maka dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas aplikasi SIKS-NG di Desa Kludan. Maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana efektivitas aplikasi SIKS-NG sebagai sistem informasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Kludan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, bertujuan untuk menyatukan dan menjelaskan informasi dan data secara mendalam. Lokasi penelitian terletak di Desa Kludan, Kecamatan

Tanggulangun, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG). Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara data sekunder diperoleh dari literatur jurnal, artikel ilmiah, dan media massa. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan yang memiliki wawasan mendalam terkait isu yang diteliti. Informan utama adalah Nadziful Ulum selaku operator aplikasi SIKS-NG, Maharani Sukma Kuntari selaku Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan Sugianto selaku salah satu ketua RT yang membantu pelaporan keluarga kurang mampu.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan peringkasan data untuk memudahkan penelitian. Selama proses penelitian berlangsung reduksi data juga akan berjalan, terutama dalam mengumpulkan data terkait penerapan SIKS-NG di desa. Penyajian data bertujuan mempermudah analisis dengan penyusunan yang terperinci, singkat, dan menyeluruh. Hasil reduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Dalam tahap akhir, Kesimpulan diambil dengan memperhatikan validitas internal (kebenaran), validitas eksternal (keterapan), dan reliabilitas (objektivitas dan konsistensi) untuk menjelaskan temuan penelitian secara jelas dan singkat[18].

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan analisis dan deskripsi berbagai permasalahan terkait efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), peneliti menggunakan tiga indikator yang dikemukakan oleh Richard M. Steers untuk menilai tingkat efektivitas, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, serta adaptasi.

#### 1. Pencapaian Tujuan

Menurut pendapat Richard M. Steers, pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses yang tidak terputus. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan akhir, diperlukan pendekatan yang bertahap, baik dalam hal pemaknaan maupun pemahaman setiap tahapan. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan, seperti alokasi waktu dan penetapan target yang jelas. Tingkat keberhasilan suatu penelitian dalam mencapai tujuan dapat dievaluasi melalui indikator kinerja serta hasil dari layanan yang diberikan[1]. Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan pencapaian tujuan dapat ditinjau dari sejauh mana target telah tercapai dan seberapa efisien penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui penggunaan aplikasi di Desa Kludan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator SIKS-NG di Desa Kludan diperoleh informasi *“aplikasi SIKS-NG ini memudahkan saya (operator) dalam melakukan pendataan masyarakat di Desa Kludan, namun terkadang ditemukan adanya data masyarakat yang tidak sesuai seperti nama yang salah, seperti namanya Muhammad tapi di system tertulis Mochammad. Jadinya saya harus memastikan data yang sebenarnya dengan mengecek secara langsung di lapangan.”* Pada dasarnya, aplikasi SIKS-NG membantu operator dalam mengelola dan mencatat data masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Dengan adanya sistem ini, proses pendataan menjadi lebih mudah karena data dapat dimasukkan, diperbarui, dan dipantau secara digital. Hal ini juga membantu pemerintah dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti adanya ketidaksesuaian data di dalam sistem. Oleh karena itu, operator perlu melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kebenaran data yang tercatat di sistem. Langkah ini dilakukan agar data yang dimasukkan ke dalam sistem benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses pendataan maupun dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyatakan *“kehadiran Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) diharapkan dapat membantu pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa, dalam melakukan pendataan dan pemantauan terhadap keluarga yang tergolong kurang mampu. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih akurat dan terintegrasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya data yang tersusun secara sistematis, proses identifikasi keluarga yang membutuhkan bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Oleh karena itu, SIKS-NG berperan penting dalam mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.”* Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) memberikan manfaat dalam hal kemudahan untuk menyampaikan dan memperbaiki data penerima bantuan sosial secara *online*. Masyarakat dapat langsung didaftarkan oleh operator desa sebagai calon penerima bantuan sosial, dan apabila terdapat kekeliruan dalam data identitas seperti nama, NIK, atau status kependudukan, sistem akan secara otomatis melakukan sinkronisasi dengan data kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hal ini dimungkinkan karena SIKS-NG dikelola oleh Kemensos yang bekerja sama langsung dengan Dukcapil untuk memverifikasi dan memperbarui data secara *real-time*. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pendataan bantuan sosial masyarakat, berikut data mengenai penghentian DTKS per bulan Januari 2025 di Desa Kludan.

Table 2 Data Penghentian DTKS

NO	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
1.	Usulan Penghentian PKH	6 Orang
2.	Usulan Penghentian DTKS	3 Orang
3.	Usulan Penghentian Sembako	4 Orang
4.	Usulan Penghentian PBI	11 Orang

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Tabel 2 menyajikan data usulan baru dan usulan penghentian DTKS pada periode Januari 2025 yang diolah oleh penulis tahun 2025. Pada periode tersebut tercatat sebanyak 18 orang yang diusulkan sebagai usulan baru DTKS. Sementara itu, untuk usulan baru bantuan sosial tercatat tidak ada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang diusulkan, namun terdapat 10 penerima bantuan sembako yang masuk dalam kategori usulan baru. Pada kategori penghentian, tidak terdapat usulan penghentian DTKS maupun penghentian bantuan sosial, baik untuk PKH maupun sembako. Namun demikian, terdapat 8 orang yang diusulkan dalam kategori penghentian PBI. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa pada Januari 2025 lebih banyak terjadi penambahan data dibandingkan penghentian, dengan pengecualian pada kategori PBI yang mencatat adanya usulan penghentian. Usulan untuk menghentikan pemberian bantuan sosial kepada beberapa penerima karena adanya perubahan kondisi yang membuat mereka tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Usulan penghentian ini didasarkan pada hasil pendataan atau verifikasi yang dilakukan terhadap data penerima bantuan di masyarakat. Beberapa alasan yang menjadi dasar penghentian bantuan tersebut antara lain karena penerima bantuan telah meninggal dunia, sehingga secara administratif tidak memungkinkan lagi untuk menerima bantuan. Selain itu, ada juga penerima yang kondisi ekonominya sudah tergolong mampu atau mengalami peningkatan kesejahteraan, sehingga tidak lagi termasuk dalam kategori masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Selain dua alasan tersebut, penghentian bantuan juga diusulkan karena alamat penerima tidak dapat ditemukan atau tidak sesuai dengan data yang tercatat. Hal ini menyulitkan proses verifikasi maupun penyaluran bantuan. Oleh karena itu, penghentian bantuan dilakukan agar data penerima bantuan tetap akurat dan bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua RT di Desa Kludan mendapatkan informasi bahwa *“dalam kegiatan pendataan di lingkungan RT, saya (ketua RT) biasanya membantu melakukan pencatatan data warga, khususnya warga yang sudah lanjut usia (lansia). Pendataan ini dilakukan agar para lansia dapat teridentifikasi dengan baik sehingga mereka berkesempatan untuk memperoleh berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah maupun pihak terkait. Dengan adanya pendataan tersebut, diharapkan bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran kepada warga yang memang membutuhkan, terutama bagi lansia yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.”* Pendataan yang dilakukan difokuskan terutama kepada warga yang sudah lanjut usia (lansia). Hal ini dilakukan karena kelompok lansia sering kali menjadi salah satu prioritas dalam program bantuan sosial dari pemerintah maupun lembaga terkait. Melalui pendataan tersebut, data mengenai warga lansia dapat tercatat dengan lebih jelas dan akurat. Data ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Dengan demikian, proses pendistribusian bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, kegiatan pendataan ini juga menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam membantu proses administrasi di tingkat lingkungan. Peran informan dalam membantu mendata warga lansia dapat mendukung kelancaran program bantuan sosial, sehingga kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok lansia, dapat lebih diperhatikan.

Aspek krusial dalam proses pengajuan bantuan sosial melalui SIKS-NG adalah kesesuaian data pemohon dengan data yang tercatat dalam sistem Dukcapil. Ketidaksesuaian data, seperti ketidaksesuaian NIK atau alamat, akan menyebabkan sistem menolak proses pengajuan tersebut hingga data diperbaiki. Dengan demikian, validitas data menjadi faktor utama yang mempengaruhi kelancaran proses pengajuan bantuan. Keselarasan dan keterpaduan data ini memperkuat akuntabilitas sistem sekaligus mencegah potensi dukungan bantuan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan aplikasi ini di Desa Kludan menjadikan proses distribusi bantuan lebih terbuka dan akuntabel. Masyarakat dapat mengakses informasi secara mandiri melalui laman resmi milik Kemensos, yakni [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id), guna memastikan apakah nama mereka telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.

Indikator pencapaian tujuan menunjukkan bahwa aplikasi ini telah memfasilitasi pemerintah desa Kludan, khususnya operator SIKS-NG untuk berperan aktif dalam menangani ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial serta menyesuaikan diri dengan perubahan pada system aplikasi. Meskipun demikian, implementasi indikator pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena masih terdapat kendala berupa perbedaan data penerima di system dengan kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga operator perlu melakukan verifikasi ulang untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa pencapaian tujuan belum sepenuhnya optimal. Diperlukan perbaikan dalam proses verifikasi

data, pemutakhiran informasi dan diperlukannya penyempurnaan fitur aplikasi agar data yang dihasilkan lebih akurat dan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran[18].

## 2. Integrasi

Menurut Richard M. Steers, integrasi diartikan sebagai proses penyatuan beragam unsur, proses, atau system menjadi satu kesatuan yang harmonis dan saling terhubung[19]. Dalam hal efektivitas, integrasi mencakup usaha untuk mengatur dan menyatukan berbagai elemen atau bagian dalam suatu organisasi atau program agar dapat mencapai tujuan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Integrasi yang tepat memungkinkan semua bagian organisasi untuk beroperasi secara sinergis, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan memperkuat kerja sama. Integrasi yang solid juga berkontribusi pada terciptanya kesatuan visi dan tujuan, mempermudah komunikasi, serta meningkatkan koordinasi dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan [18].

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Kludan diperoleh informasi “*aplikasi ini juga terhubung dengan Dinas Sosial, jadi jika ditemukan adanya masyarakat yang sebelumnya mendapatkan bansos kemudian ia berpindah domisili maka dapat diajukan kembali ke operator di desa. Operator dapat membantu pembaruan data agar masyarakat bisa memperoleh bantuan sosial dari pemerintah.*” Operator menyatakan bahwa mereka terlebih dahulu mencari penyebab ketidakcocokan data yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Setelah mengetahui penyebabnya, operator kemudian membantu masyarakat yang bersangkutan untuk memperbaiki data mereka agar sesuai dengan yang tercatat di sistem, sehingga mereka dapat menerima bantuan sosial yang seharusnya.

Menurut hasil wawancara dengan pihak Dinsos diperoleh informasi bahwa “*Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) telah terintegrasi dengan data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil. Integrasi ini memungkinkan sistem untuk memanfaatkan data kependudukan resmi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan informasi identitas lainnya yang telah tercatat secara nasional. Dengan adanya keterhubungan tersebut, proses penginputan dan verifikasi data masyarakat menjadi lebih mudah dan akurat. Selain itu, integrasi ini juga berfungsi untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dalam penulisan data serta menghindari adanya data ganda (double data) dalam sistem. Dengan demikian, data yang digunakan dalam program kesejahteraan sosial dapat lebih valid dan dapat mendukung penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.*” Integrasi ini berarti bahwa data yang digunakan dalam SIKS-NG dapat mengakses dan memanfaatkan data kependudukan resmi milik pemerintah, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan identitas penduduk lainnya. Dengan adanya keterhubungan tersebut, proses pendataan masyarakat menjadi lebih mudah dan lebih akurat. Data yang dimasukkan ke dalam sistem dapat langsung disesuaikan dengan data kependudukan yang sudah tercatat secara resmi di Dukcapil. Hal ini membantu operator dalam memastikan bahwa data yang digunakan benar dan sesuai dengan identitas asli masyarakat. Selain itu, integrasi ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya data ganda dalam sistem. Jika data masyarakat sudah tercatat menggunakan NIK yang sama, sistem dapat mendeteksi sehingga tidak terjadi pencatatan yang berulang. Dengan demikian, data masyarakat yang tersimpan dalam SIKS-NG menjadi lebih valid dan dapat mendukung penyaluran bantuan sosial secara lebih tepat sasaran.

Proses koordinasi antara pihak desa, Dinas Sosial (Dinsos), dan instansi terkait lainnya juga berjalan dengan baik. Dalam hal ini, operator mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pihak desa dan instansi-instansi tersebut berjalan lancar, terutama ketika pihak desa menemui kesulitan dalam melakukan pendataan. Pemerintah desa dapat dengan mudah berinteraksi dan menyelesaikan masalah yang muncul selama proses pendataan dan verifikasi data. Selain itu, operator menambahkan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan sistem berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti.

Gambar 1 Fitur View DTKS Aplikasi SIKS-NG

No	NIK	NIK	Nama	Alamat	No KK	No KK / Pekerjaan	Tanggal Daftar Sesuai Pemenuhan	SPNT	PSH1	PSH2	PSH4
1						2021-07-28	2021-07-28	7.644	7.806	7.824	7.688
2						2021-05-05	2021-05-05	7.644	7.806	7.824	7.688
3						2022-01-01	2022-01-01	7.644	7.806	7.824	7.688
4						2020-02-02	2020-02-02	7.644	7.806	7.824	7.688

Sumber: Operator SIKS-NG Desa Kludan

Berdasarkan gambar 1 menampilkan tampilan antarmuka sistem pendataan kesejahteraan sosial yang digunakan untuk mengelola dan memverifikasi data penerima bantuan. Pada bagian atas layar terdapat menu navigasi

di sisi kiri yang memuat beberapa pilihan layanan, sedangkan pada bagian utama terdapat fitur filter data yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian berdasarkan beberapa kriteria seperti NIK, No KK, PKH, serta filter wilayah dan status data. Di bawah kolom filter terdapat pilihan jenis bantuan sosial yang dapat dicentang sesuai kebutuhan, seperti PKH, BPNT/Sembako, PBI, dan jenis bantuan lainnya. Fitur ini memudahkan operator dalam menyaring data sesuai kategori program bantuan sosial yang diinginkan. Setelah proses penyaringan dilakukan, hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel pada bagian bawah layar. Tabel tersebut berjudul Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memuat sejumlah kolom informasi, antara lain nomor, NIK, nama, alamat, jenis bantuan, tanggal proses, serta status kepesertaan. Setiap baris data dilengkapi dengan opsi tindakan (action) yang memungkinkan pengguna untuk melihat detail atau melakukan pengelolaan data lebih lanjut. Secara keseluruhan, tampilan ini menunjukkan sistem administrasi yang dirancang untuk mendukung proses pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial secara terstruktur dan sistematis.

Integrasi ini mencerminkan upaya sistematis untuk menyatukan berbagai komponen administrasi agar dapat berfungsi secara sinergis dalam mencapai tujuan program. Melalui fitur penyaringan (filter) dan penyajian data dalam bentuk tabel yang terstruktur, operator dapat melakukan proses pencarian, verifikasi, dan pembaruan data secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, setiap tahapan pengelolaan data mulai dari input, validasi, hingga pengambilan keputusan dapat terlaksana secara terkoordinasi dan mendukung optimalisasi kinerja organisasi. Selain itu, integrasi sistem ini menjadi landasan penting dalam menjamin keakuratan dan validitas data penerima bantuan sosial. Kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melalui sistem elektronik memungkinkan terjadinya sinkronisasi data kependudukan secara berkelanjutan, sehingga dapat meminimalkan terjadinya data ganda maupun data yang tidak valid. Sistem yang terintegrasi tersebut tidak hanya menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga mempercepat proses verifikasi dan pengambilan keputusan oleh instansi terkait. Dengan demikian, integrasi yang solid sebagaimana dikemukakan oleh Steers berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, serta ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi kesejahteraan sosial bergantung pada kualitas integrasi data antara berbagai instansi terkait. Hasil penelitian terdahulu ditemukan bahwa kerja sama antara pemerintah desa dengan dinas terkait cukup efektif dalam pemberian bantuan sosial secara tepat sasaran[18]. Sehingga hasil penelitian yang ditemui mengenai keberhasilan integrasi data dan koordinasi antar instansi terkait, yang mendukung tercapainya tujuan sistem dalam memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran.

### 3. Adaptasi

Menurut Richard M. Steers, adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, terutama dalam hal implementasi program yang relevan dengan kondisi actual. Beberapa indikator yang dipakai untuk menilai kemampuan ini mencakup kesiapan staff dan keberadaan sarana serta infrastruktur yang mendukung. Adaptasi juga dapat diartikan sebagai proses penyesuaian individu terhadap perubahan lingkungan, yang mencakup keterampilan pengembangan serta penyesuaian terhadap kemajuan fasilitas yang tersedia[4]. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, efektivitas penerapan SIKS-NG dalam kemiskinan data dapat diukur dan dianalisis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, diperoleh informasi *“Jadi sebelum menggunakan aplikasi SIKS-NG ini, para operator mendapatkan bimtek terlebih dahulu dari Dinas Sosial.”* Kegiatan bimtek tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para operator terkait tata cara penggunaan aplikasi, mekanisme penginputan data, serta prosedur pengelolaan data kesejahteraan sosial yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pelaksanaan bimtek ini, diharapkan para operator dapat mengoperasikan aplikasi SIKS-NG secara tepat dan efektif sehingga proses pengelolaan data penerima bantuan sosial dapat berjalan dengan lebih tertib, akurat, dan terkoordinasi.

Selain itu operator desa mengatakan bahwa *“Bimbingan Teknis juga tidak sering dilakukan, cuma pas ada pembaruan fitur aja. Seperti saat ini ada pembaruan fitur pada aplikasi SIKS-NG. pembaruan tersebut karena adanya transisi DTKS menuju DTSEN, sehingga selama proses pembaruan memiliki dampak terhambatnya proses pendataan dan pembaruan informasi. Kalau sosialisasi itu ada dari Dinas Sosial dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG, jadinya pihak operator juga merasa terbantu dengan adanya sosialisasi itu.”* Berdasarkan hasil wawancara tersebut pembaruan sistem melibatkan transisi data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial, menuju Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selama masa pembaruan berlangsung, aplikasi SIKS-NG tidak dapat diakses oleh operator desa, yang berdampak pada terhambatnya proses pendataan dan pembaruan informasi kesejahteraan sosial di tingkat lokal.

Aplikasi SIKS-NG sendiri dirancang untuk bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, khususnya oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam praktiknya, kebijakan dan pedoman teknis yang diperbarui oleh Kemensos akan terlebih dahulu disampaikan kepada Dinas Sosial (Dinsos) tingkat kabupaten/kota, sebelum akhirnya diturunkan ke pemerintah desa untuk diimplementasikan. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah desa untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan regulasi secara terstruktur dan

terkoordinasi. Namun demikian, dari sisi teknis, ditemukan adanya keterbatasan dalam sistem aplikasi, khususnya terkait ketiadaan fitur umpan balik (*feedback*) secara langsung di dalam aplikasi SIKS-NG. Apabila terjadi kesalahan sistem atau operator desa mengalami kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur tertentu dalam aplikasi, mereka tidak dapat menyampaikan laporan atau pertanyaan secara langsung melalui sistem. Sebaliknya, operator desa harus menghubungi operator di Dinas Sosial Kabupaten untuk mendapatkan bantuan atau petunjuk lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem SIKS-NG masih memerlukan pengembangan dalam hal dukungan teknis yang responsive dan efisien.

Dari aspek infrastruktur teknologi, hasil wawancara dengan operator desa menunjukkan bahwa “*Infrastruktur yang dimiliki Desa Kludan sudah cukup baik dan memadai untuk melakukan pendataan dengan aplikasi SIKS-NG*”. Operator mengatakan tidak terdapat kendala signifikan dalam pelaksanaan aplikasi SIKS-NG di Desa Kludan. Sarana infrastruktur pendukung seperti perangkat computer dan koneksi internet dinilai sudah memadai dan mampu menunjang pengoperasian aplikasi secara optimal. Dengan demikian, aspek teknis dan infrastruktur bukan merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan program di desa tersebut. Berikut data perangkat keras yang digunakan oleh operator SIKS-NG dalam menggunakan aplikasi SIKS-NG.

Table 3 Perangkat Keras (hardware) Pada Aplikasi SIKS-NG

NO	Jenis Perangkat Keras	Jumah
1.	Personal Komputer	1
2.	Keyboard	1
3.	Monitor	1
4.	Mouse	1
5.	Printer	1

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan table 3 menunjukkan infrastruktur yang digunakan oleh operator. Dalam table tersebut menunjukkan daftar jenis perangkat keras yang digunakan dalam pengoperasian aplikasi SIKS-NG, yang terdiri atas satu unit personal komputer, satu keyboard, satu monitor, satu mouse, dan satu printer sebagai sarana pendukung utama. Seluruh perangkat ini berfungsi untuk mendukung proses entri, pengolahan, serta pencetakan data dalam sistem, sehingga kegiatan administrasi dan pengelolaan data kesejahteraan sosial dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, dari sisi kelembagaan, secara umum operator aplikasi SIKS-NG di desa berada di bawah bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Namun kondisi ini tidak sepenuhnya berlaku di Desa Kludan. Dalam praktiknya, pengelolaan aplikasi dilakukan oleh personel yang tidak berada di bawah struktur Kesra, tetapi telah ditunjuk secara khusus untuk menjalankan tugas sebagai operator aplikasi. Meskipun demikian, operator yang dituahkan menyatakan kesiapan dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kompetensi para operator, Dinas Sosial juga telah menyelenggarakan pelatihan teknis. Pelatihan ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman serta keterampilan para operator dalam mengelola sistem informasi kesejahteraan sosial.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menyatakan aplikasi SIKS-NG dinilai efisien dalam melakukan proses pendataan kesejahteraan sosial. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, keberhasilan implementasi SIKS-NG menunjukkan bahwa sistem telah mampu memenuhi tujuan utamanya, yaitu menyediakan data sosial yang cepat dan efisien untuk mendukung program-program kesejahteraan. Namun, terdapat juga tantangan yang telah ditemukan pada penelitian sebelumnya yaitu pembaruan fitur aplikasi tanpa pemberitahuan yang dapat menghambat operasional operator untuk melakukan pengusulan data masyarakat[18].

#### IV. SIMPULAN

Temuan Fundamental: Berdasarkan studi implementasi SIKS-NG di Desa Kludan, dapat disimpulkan bahwa, dalam hal indikator pencapaian tujuan, SIKS-NG telah memfasilitasi pemerintah desa dalam proses validasi dan distribusi bantuan sosial, meskipun verifikasi manual masih diperlukan untuk memastikan keakuratan data, dan mengenai indikator integrasi, koordinasi antara pemerintah desa, Dinas Sosial (Dinsos), dan Kantor Catatan Sipil (Dukcapil) telah terjalin dengan baik; namun, komunikasi dengan masyarakat masih perlu diperkuat, sedangkan dalam hal indikator adaptasi, operator desa telah mampu menyesuaikan diri dengan pembaruan sistem karena ketersediaan infrastruktur dan pelatihan yang memadai, sehingga secara keseluruhan SIKS-NG telah memberikan kontribusi positif, namun perbaikan dalam aspek teknis masih diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Implikasi: Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam pengoperasiannya, termasuk perbedaan antara sistem dan kondisi lapangan aktual, komunikasi terbatas dengan masyarakat, dan tidak adanya fitur umpan balik, oleh karena itu verifikasi berlapis dan integrasi yang lebih kuat dengan data populasi diperlukan, bersamaan dengan penambahan fitur komunikasi, pendidikan digital yang lebih luas bagi penerima manfaat, dan pengembangan fitur pengaduan dan dukungan teknis secara real-time. Keterbatasan: Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena dilakukan dalam periode tertentu, sedangkan aplikasi SIKS-NG bersifat dinamis dan terus diperbarui, sehingga temuan mungkin berbeda jika penelitian dilakukan pada waktu lain. Penelitian Masa Depan: Penelitian masa depan disarankan untuk fokus pada aspek-aspek seperti keamanan data, keberlanjutan teknologi, dan potensi integrasi SIKS-NG dengan sistem digital lainnya, sehingga aplikasi tersebut benar-benar dapat berfungsi sebagai alat yang transparan, akuntabel, dan adaptif untuk pengelolaan data sosial yang sejalan dengan perkembangan zaman.

## REFERENSI

- [1] S. A. P. Ramadhani and I. F. Agustina, “Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Desa,” *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 14, no. 4, Jan. 2025, doi: 10.33005/jdg.v14i4.4913.
- [2] L. Mursyidah and N. Nofi, “Evaluating SIKS-NG’s Performance in Jabon District Social Welfare,” *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, vol. 15, no. 3, Oct. 2024, doi: 10.21070/ijccd.v15i3.1120.
- [3] D. Farhatun, “Manfaat Sistem Informasi Manajemen Berbasis Aplikasi Siks-Ng Dalam Memudahkan Pendaftaran Masyarakat Penerimaan Bantuan (Studi Di Kantor Balai Desa Dahari Indah Talawi Batu Bara),” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, vol. 1, no. 6, pp. 420–427, 2024.
- [4] Haromin and D. Andriyansyah, “Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung,” *Jisipol*, vol. 6, no. 3, 2022.
- [5] S. Yulfa and D. Suhita, “Efektivitas Penggunaan Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Berbasis E-Government Di Dinas Sosial Kabupaten Sragen,” *Solidaritas*, vol. 9, no. 1, 2025.
- [6] E. H. Purwanti, “Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba,” *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies*, vol. 4, no. 1, pp. 91–103, Feb. 2023, doi: 10.33822/jpds.v4i1.6580.
- [7] S. Yulfa and D. Suhita, “Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SISK-NG) Berbasis E-Government Di Dinas Sosial Kabupaten Sragen,” *Solidaritas*, vol. 9, no. 1, 2025.
- [8] Dinaningrum and E. H. Fanida, “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Dalam Pengusulan Dan Verifikasi Bantuan Sosial Di Desa Kledokan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan,” *Dinamika Administrasi*, vol. 5, no. 1, 2025.
- [9] S. F. Yanti, Y. D. Lestari, and D. Hidayat, “Sistem Informasi Untuk Menentukan Penerimaan Bantuan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Pasar Merah Timur,” *Jurnal Teknik Informasi dan Komputer (Tekinkom)*, vol. 5, no. 2, p. 409, Dec. 2022, doi: 10.37600/tekinkom.v5i2.689.
- [10] D. Oktavianto and Supriyanto, “Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Guna Meningkatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Desa Simoboyo Kecamatan Benjeng-Gresik),” *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, no. 1, 2023.
- [11] T. A. Angganten, “Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Tapak Kabupaten Magetan,” *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2025.
- [12] A. V. Setya, “Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation (Siks-Ng) Dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Di Dinas Sosial Pppa Kabupaten Banjarnegara,” Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024.
- [13] I. Ratnasari, E. Ramadan, I. Nurlatifah, S. E. Ginanjar, and R. Santa, “Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Untuk Pengajuan DTKS,” *Jurnal Sosial Teknologi*, vol. 4, no. 2, pp. 109–115, Feb. 2024, doi: 10.59188/jurnalsostech.v4i2.1140.
- [14] D. Maulana, P. Pemerintah, and K. Brebes, “Analysis Of Social Protection Policy Program Based On A Value-Based Approach In Brebes Regency”, doi: 10.47441/jkp.v19i1.353.
- [15] N. M. S. Harthamia, Ni Putu Anik Prabawati, and I Dewa Ayu Putri Wirantari, “Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) Studi Kasus Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara.,” *Socio-political Communication and Policy Review*, vol. 2, no. 3, Jun. 2025, doi: 10.61292/shkr.251.
- [16] M. G. I. Palili, R. Indriasari, and D. E. K. Mendrofa, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cibereum

- Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 8, no. 1, pp. 7746–7754, 2024.
- [17] R. A. Ningrum and I. Rodiyah, “Implementation of The Hope Family Program (PKH) in Bligo Village, Candi District, Sidoarjo Regency,” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, vol. 7, no. 1, pp. 7–13, May 2022, doi: 10.21070/jkmp.v7i1.1691.
- [18] V. D. Windari and I. Rodiyah, “Mengubah Sistem Kesejahteraan Sosial: Wawasan dari Sistem Informasi Generasi Selanjutnya (SIKS-NG),” *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, vol. 1, no. 1, p. 17, May 2024, doi: 10.47134/jpem.v1i1.290.
- [19] T. Nur, A. Alfiah, S. R. Zulfa, and M. H. Ridwan, “Efektivitas Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Anak Terlantar Di Kota Sukabumi,” *JPPA-Journal of Regional Public Administration*, vol. 9, no. 1, 2024.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*